



## Hadi: Status Tersangka Dipaksakan

**KETAPANG, TRIBUN** - Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas mengaku status tersangka yang ditetapkan kepada dirinya terindikasi dipaksakan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang. Alasan Hadi, dari proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi hingga penetapan status tersangka, dirinya dalam kondisi sakit dan dalam proses pengobatan.

Ditemui di Mapolres Ketapang, Senin (19/8), Hadi mengaku kondisi sakitnya

■ Bersambung ke hal. 7

### Hadi: Status Tersangka Dipaksakan

Sambungan Hal.1

ini sudah diketahui pihak Kejaksaan Ketapang, baik secara lisan maupun surat. Ia menjelaskan, jika seseorang di dalam status sakit maka tidak dibenarkan status seorang tersebut ditetapkan tersangka. Terlebih dirinya mengaku taat hukum dan kooperatif dalam memberikan penjelasan kepada instansi terkait yang menangani kasusnya ini.

"Suratnya resmi keterangan saya sakit kita serahkan ke Sekretariat Dewan maupun ajudan saya. Saya heran kok saya ditetapkan menjadi tersangka, itulah yang menyebabkan saya keberatan, karena saya dalam memberikan keterangan da-

lam kondisi sakit," terang Hadi Upas saat menggelar konferensi pers di Mapolres Ketapang, Senin (19/8) sore.

Hadi meluruskan tuduhan jual beli proyek hingga mengakibatkan kerugian Negara mencapai Rp 4 miliar lebih pada tahun anggaran 2017-2018 lalu. Hadi Mulyono Upas mengaku kalau aspirasi tersebut bukanlah murni miliknya sendiri. Ia menyebut nama kepala daerah di masa itu. Ia mengatakan kalau dana APBD 2017-2018 yang masuk lewat dana aspirasi miliknya itu sengaja dititipkan kepala daerah untuk membantu biaya kegiatan di luar kegiatan APBD di tahun tersebut. Sehingga uang

dari persentase hasil proyek aspirasi tersebut dinamakan dana kebijakan daerah.

"Uang ini harus saya klarifikasi untuk apa saja. Ini bukan untuk saya pribadi, ini untuk uang kebijakan. Ini langsung Bupati, karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa dikelola dalam APBD Ketapang," katanya.

Seperti diketahui Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menetapkan Ketua DPRD Ketapang Hadi Mulyono Upas sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang terhadap pokok pikiran atau aspirasi dirinya sebagai anggota DPRD tahun anggaran 2017 dan 2018. (nur)